

MERANCANG SEJARAH YANG MULTIKULTURALIS DALAM KURIKULUM 2004

Oleh: Hermanu Joebagio
FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

After the crisis of 1998, which was followed by a periode labeled as ‘reformasi’, Indonesia having entered a transitional phase from authoritarian rule toward a new democratic system. In transitional phase emerged outbursts of ethnic and religious violences in various regions of the archipelago.

This articles tries to analyze multicultural studies in a period of the new order. In education perspective, the outbursts of ethnic and religious violences after ‘reformasi’, showed that the new order was failure to make harmony by created the instruction of religious, civic skill, and military instructional as labeled ‘kewiraan’. Recently time, history, could be formulated to be multicultural studies. The curriculum of history have been modified and transformed to the multicultural studies by used the burhani technical system. The burhani technical system usually used to analyze religious texts. The themes of curriculum history, and then modify, to produce the themes of multicultural studies by consider the social sciences (sociology, politics, and economics) and humanity sciences (anthropology and religion).

Key words: authoritarian, democratic, violence, multicultural studies, and burhani technical system

Pendahuluan

Memasuki ambang milenium ketiga, sebagian besar orang Indonesia merasa sangat cemas, karena tingkat kekerasan dalam masyarakat cukup tinggi. Tuntutan tokoh-tokoh oposisi

baik politisi maupun mahasiswa untuk membangun pemerintah yang demokratis, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang (good governance) telah menuai aneka tekanan, intimidasi, dan kekerasan fisik. Puncak kekerasan terjadi pada tahun 1998 yang diwarnai pembakaran gedung pertokoan di beberapa kota besar, penjarahan, tindakan kriminal lainnya, dan perkosaan. Diskursus kekerasan dan kerusuhan adalah *by design* dengan menciptakan situasi *chaotic*. Melalui ciptaan situasi penguasa dengan bantuan aparat keamanan dapat mengendalikannya, dan membayangkan serta mengharap pulihnya legitimasi kekuasaan yang sudah memudar. Namun, diskursus pemikiran itu berubah menjadi permusuhan bernuansa keagamaan dan etnisitas yang sulit dikendalikan maupun diakhiri, seperti kasus konflik di Aceh, Ambon, Sampit, Poso, Kupang, Mataram, Mamasa, dan terakhir kasus ‘Sang Timur’ di Tangerang.

Konflik primordial yang muncul di era reformasi adalah akibat dari kebijakan politik pendahulunya yang cenderung memilih sifat “seragam” dan tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Penciptaan situasi politik ini dimaksudkan untuk membangun stabilitas politik selama proses pembangunan. Kritik dan perbedaan selalu diasumsikan masyarakat umum maupun pemerintah sebagai budaya pembangkangan, yang dikhawatirkan dapat menumbuhkan dan mendorong ‘tindakan-tindakan subversif’ kelompok sosial lainnya. Dalam pemikiran Lance Castle (1998:35-38) kritik dan pengakuan terhadap perbedaan pada hakekatnya merupakan faktor yang dapat membangun persatuan bangsa, namun fenomena itu sebuah ‘keniscayaan’ dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia. Pembunuhan massal di Yugoslavia, mungkin juga telah terjadi di Aceh, terutama pada masa daerah operasi militer. Beragam kenyataan ini memberi petunjuk bahwa perbedaan pemikiran dan kritik belum dapat diterima dan diakomodasi dalam sebuah dinamika bangsa dan negara. Begitu pula pembunuhan terhadap ulama di Jawa Timur yang dituduh sebagai dukun santet, sebagai akibat adanya ketegangan politik antar pucuk

pimpinan NU dengan elit pemerintah.

Para bapak pendiri bangsa (the founding fathers) ketika memproklamasikan republik ini telah memperhitungkan adanya sentimen primordial yang hidup dalam masyarakat, dan faktor itu diakomodasi menjadi dasar sebagai sebuah kekuasaan dan identitas bangsa. Keberlangsungan kekuasaan dan identitas bangsa harus dibingkai dengan konsep budaya politik yang disebut revolusi integrasi, dengan harapan agar ikatan kultural dari primordialisme dapat diintegrasikan ke dalam ikatan kultural yang lebih luas yang mendukung pemerintahan nasional (Geertz, 1975:255-310). Tanpa bingkai revolusi integrasi dikhawatirkan memicu kekecewaan-kekecewaan di antara etnis dan aliran politik yang hidup dalam masyarakat, hingga akumulasi kekecewaan dapat memicu tumbuh dan berkembangnya gagasan regionalisme.

Regionalisme sebagai separatisme terhadap negara dan pemerintahan yang sah, serta berkeinginan mendirikan negara dan pemerintahan sendiri (Moerdiono, 1998:15-16). Regionalisme merupakan sindrom politik, karena lemahnya institusi nasional berhadapan dengan tingginya harapan masyarakat terhadap negara nasional. Dalam hubungannya dengan sindrom tersebut dimungkinkan tidak tertampungnya nilai-nilai budaya politik regional dalam budaya politik 'dominan' di negara nasional tersebut. Regionalisme adalah manifestasi integrasi nasional yang terhenti, dan regionalisme merupakan unsur nasionalisme yang berkehendak membangun masa depan bersama dari penduduk yang berdiam di suatu wilayah yang secara politik, ekonomi, dan budaya merasa satu komunitas serta memiliki solidaritas sangat erat. Permasalahannya adalah nasionalisme tersebut belum diletakkan dalam konteks negara bangsa, meskipun wilayah itu secara yuridis konstitusional merupakan bagian negara bangsa (Moerdiono, 1998:18-19). Tantangan terberat dari fenomena regionalisme apabila kemunculannya menggunakan wahana agama sebagai kendaraan politik, karena wahana ini memiliki potensi untuk memecah persatuan nasional (Edi Sudrajat, 1998:6).

Bingkai revolusi integrasi belum sepenuhnya dilaksanakan di

dunia pendidikan. Formulasi pemerintah untuk membangun revolusi integrasi melalui pendidikan keagamaan, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, serta pendidikan kewiraan baik di sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi belum berhasil sebagaimana yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Pada sisi lain, dalam pemikiran pemerintah bahwa melalui pengajaran bidang studi tersebut di atas dapat membangun sikap toleransi dan saling menghormati dalam proses interaksi kehidupan, dan menjadi sebuah pendidikan multikultural.

Menurut Musa Asy'arie (2004:5) ketiga bidang studi tersebut di atas belum berhasil mewujudkan pendidikan multikultural, karena terkontaminasi kepentingan politik pemerintah dan kelompok-kelompok berkepentingan dalam masyarakat. Budaya kepentingan ini yang menggagalkan konsep revolusi integrasi yang dicanangkan pendiri negara kita. Pendidikan kewiraan telah kehilangan dimensinya, karena militer sebagai pencetus pendidikan ini memosisikan diri sebagai garda depan pengaman orde baru. Pada sisi lain, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan menjadi anti realisme, karena tidak mengalami aktualisasinya di tengah-tengah realitas perubahan sosial yang kompleks serta dalam lingkup tekanan budaya global yang cenderung materialistis dan hedonistis. Pendidikan agama cenderung menggunakan legitimasinya sendiri untuk menafikan hak hidup agama lain, dan tidak mengedepankan pedagogis agama yang lebih dialektikal terhadap persoalan kemiskinan sebagai kemungkaran yang menjadi musuh keimanan. Implementasi pengajaran semacam ini, khususnya di kawasan rawan konflik, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi ideologi bangsa dan selalu terpampang di depan kelas menjadi tidak bermakna, karena telah kehilangan proses penanaman sebagai cara hidup saling menghormati dan toleran terhadap keragaman budaya yang ada di tengah-tengah kemajemukan masyarakat.

Kondisi negara bangsa yang rawan benturan konflik maka perlu kiranya dipikirkan tentang kehadiran pendidikan multikultural di

sekolah-sekolah dasar dan menengah. Tulisan ini dimaksudkan untuk menelusuri bagaimana penerapan pendidikan multikultural di bawah naungan kurikulum 2004, dan basis kompetensi apa saja yang harus dikuasai peserta didik selama proses pembelajaran di kelas, serta sejauhmana pendidikan multikultural dapat merevitalisasi bidang-bidang studi lain dalam kurikulum tersebut.

Multikulturalisme

Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian multikulturalisme, perlu kiranya membedakan kata multikultural dan multikulturalisme. Multikultural adalah kata sifat yang merujuk pada fakta keragaman, sedangkan multikulturalisme adalah menekankan pada sikap normatif atas keberadaan fakta keragaman itu. Dalam konteks geo-antropologis, keragaman bangsa Indonesia dilukiskan sebagai banyaknya rumpun bahasa, dialek, dan agama yang digunakan serta dipeluk komunitas-komunitas etnis dan suku bangsa. Namun, keanekaragaman itu tidak serta merta dapat diterjemahkan sebagai konsep multikulturalisme. Will Kymlicka (dalam Hari Juliawan, 2004:4) mengemukakan bahwa untuk memahami multikulturalisme, tentunya harus melihat sejauhmana keragaman kultur diwadahi dalam negara. Menurutnya ada dua bentuk keragaman kultur yang diwadahi negara, apakah dalam bentuk multibangsa atau polietnis. Kehadiran negara multibangsa dilandasi koeksistensi beberapa bangsa yang semula berdiri sendiri-sendiri dalam batas teritorial masing-masing. Penggabungan dapat melalui invasi, penjajahan, dan sukarela. Di dalam negara bangsa ini ada tuntutan otonomi untuk mempertahankan kulturenya sendiri ketika berhadapan dengan kultur mayoritas. Sementara itu, bentuk polietnis, kelompok-kelompok etnis bergabung secara longgar. Mereka menghendaki diterima sebagai bagian dari sebuah masyarakat luas dan diakui keunikan kultur etnisnya.

Dua bentuk keragaman kultur di atas terjadi di Indonesia. Isu-isu tentang tuntutan otonomi daerah harus diakomodasi dan diberlakukan,

terutama pada daerah-daerah yang mengalami surplus dan rawan konflik, karena selama tiga dekade kekayaan daerah ‘dikeruk’ pemerintah pusat dan daerah tidak diberdayakan sebagaimana mestinya. Fenomena ini dikategorikan sebagai tuntutan dalam kerangka negara multibangsa. Pada sisi lain, tuntutan etnis Tionghoa untuk diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan dihapuskan dari praktik-praktik diskriminasi terhadap komunitasnya adalah tuntutan dalam kerangka negara multietnis (Hari Juliawan, 2004:4).

Transisi menuju demokrasi dalam masyarakat multietnis, seperti halnya yang terjadi masyarakat Indonesia, karakter kesukuannya sangat kuat (Rabushka & Shepsle, 1972:63). Dalam masyarakat transisional tersebut di atas kompetisi antar politisi secara mendasar ditandai dengan adanya politik aliran. Fenomena politik itu memiliki jaringan aliansi dan oposisi yang padat, rumit, dan terartikulasi, yang terbentuk sebagai kristalisasi secara bertahap dan dapat bertahan hingga dewasa ini, serta belum dapat berubah secara keseluruhan, meskipun masyarakat tersebut telah memasuki tahapan kehidupan politik modern. Dengan demikian tidak mengherankan apabila sentimen primordial mewarnai kehidupan politik di negara bermasyarakat majemuk, seperti Indonesia (Geertz, 1975: 255-310). Dalam masyarakat majemuk, nuansa etnisitas mewarnai setiap konflik. Hal ini dilandasi bahwa semua komunitas etnis pada umumnya terorganisasi secara politis, dan berbagai sub-komunitas yang ada memiliki sejarah sendiri, lembaga-lembaga sosial, kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek, dan kepemimpinan sendiri. Di samping itu, secara geo-politik adanya kecenderungan bahwa semua komunitas etnis memiliki basis teritorial dan homogenitas konstituen, sehingga entitas etnis sebagai bagian strategi untuk kelangsungan hidup elit politik (Rabushka & Shesle, 1972:63-65).

Berpijak pada paparan di atas dapat diasumsikan bahwa faktor teritorial dan etnisitas mendorong tumbuhnya pemikiran primordialisme. Pemikiran primordial harus dikendalikan dengan mengembangkan wacana multikulturalisme yang arif terhadap ‘kebhinekaan’ tetapi

tetap dalam nuansa 'keikaan'. Selama ini, hampir seluruh kebijakan pemerintah tidak menempatkan keunikan tradisi lokal dan pengalaman keagamaan sebagai akar kebangsaan (Abdul Munir Mulkhan, 2004:4). Pada dasarnya, setiap pengalaman, juga pengalaman keagamaan, adalah pertemuan dalam ranah konatif, yaitu pengalaman yang dialami seseorang secara langsung dan murni. Dalam pengalaman beranah konatif itu, terdapat pertemuan antara 'aku' dan 'yang lain' (Budhy Munawar Rachman, 2004:4). Pengalaman tidak dapat diartikan secara inderawi, seperti pengalaman empiris dalam pengetahuan sains. Sebab, pengalaman lebih mengacu kepada sebuah pertemuan serta kegiatan subjek dan objek, sehingga suatu pengalaman diharapkan membawa dan membangun pada kebersamaan (Budhy Munawar Rachman, 2004:5). Dengan kata lain, perspektif kebersamaan di atas tidak dapat diartikan sebagai sebuah keseragaman, karena dalam kebersamaan tetap terkandung perbedaan-perbedaan yang menjadi unsur terpenting dalam demokrasi.

Selama tiga dekade, kebijakan politik orde baru menitikberatkan pada aspek keseragaman. Ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas politik nasional dengan mengendalikan kelompok-kelompok oposisi. Kondisi politik semacam ini membawa dampak pada pemasangan sikap kritis dan kreativitas warga masyarakat, sehingga mereka kehilangan kearifan lokal dan keragaman. Keseragaman telah menimbulkan ketimpangan sosial, terutama adanya kesenjangan yang tajam dan ketidakadilan yang terpendam dalam masyarakat, dan fenomena sosial ini menjadi dasar proses pembusukan. Ketimpangan sosial berjalan cukup lama, dan bila ketimpangan itu berhadapan dengan ideologi Pancasila, maka ideologi itu sebuah jargon, karena ideologi tidak ditempatkan sebagai landasan pengembangan tata sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan (Abdul Munir Mulkhan, 2004:4). Ketimpangan sosial yang telah mengakar kuat dalam masyarakat dikuatirkan mendorong pemikiran disintegratif yang primordialis, yang semakin nyata dalam keseharian hidup bermasyarakat dan berbangsa. Fragmentasi kelompok dan konflik horizontal akhir-akhir ini bermun-

culan dan kesemuanya itu menunjukkan pantulan cermin politik yang tidak memiliki kearifan lokal dan keagamaan. Fragmentasi konflik sosial yang timbul setelah jatuhnya pemerintahan orde baru selaras dengan pandangan Huntington (2001) bahwa proses modernisasi dan globalisasi secara aktif telah menyumbang berkembangnya masalah-masalah etnisitas yang berkaitan dengan kemunculan kembali aneka persoalan komunitarian.

Multikulturalisme dalam pengertian William James yang dikutip Fajar Riza Ul Haq (2004:5) adalah sebagai “system of thought that recognizes more than one ultimate principle”. Landasan pengertian ini menekankan sikap untuk menerima heteroginitas budaya berpikir masyarakat. Pada dasarnya, heteroginitas budaya berpikir hanya dapat dikelola melalui jalur pendidikan formal dan media. Di dunia pendidikan, aneka perbedaan pendapat diciptakan guru di kelas. Kegairahan muncul karena saling berargumentasi terhadap fenomena dan simbol peristiwa, dan argumentasi itu menjadi sebuah pilihan sikap yang dilandasi oleh visi dan prinsip. Dalam konteks ini Mohamad Sobary (2004:1) mengemukakan bahwa sebuah fenomena atau simbol tidak bermakna tunggal, tetapi bersifat ganda, dan pemaknaannya sangat tergantung individu dalam proses menginterpretasikannya yang dilandasi keunikan pengalaman keagamaan dan tradisi lokalnya. Secara gamblang Mohamad Sobary (2004:1) mengemukakan aspek-aspek yang mempengaruhi sebuah interpretasi:

. . . the world of symbol is seen as a cultural product containing very complex, and multi-interpretative phenomena since this symbol is created by a complex personal interest, or aspirations, and thoughts within even more complex and wider social, economic, and political sphere. In other words, the world of symbols can sometimes be seen as the creation of s subjective taste of an individual artist, or writer.

. . . that interpretation of any given symbol could be negative, or positive, sympathetic or unsympathetic and couraging or discouraging, or even devastating depends quite heavily on the interpreter and all of his/her

underlying ideology or interests. This is commonly agreeable that in a very complex multicultural discourse, interpretation of particular symbol is inspired, or driven, by a long, and deep-rooted jealousy, hatred, and prejudice, anger, and negative image of others.

Diskursus di atas menunjukkan bahwa multikulturalisme merupakan realitas yang di dalamnya terkandung wilayah kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam perspektif politik, multikulturalisme dipahami sebagai sikap oposisi terhadap upaya monopoli kekuasaan negara serta jaringan kepentingan politik global. Perspektif ekonomi diasumsikan bahwa multikulturalisme dipahami sebagai sikap menentang monopoli wilayah-wilayah kegiatan ekonomi, sedangkan dalam perspektif sosial, multikulturalisme menempatkan diri sebagai kekuatan ideologis yang melindungi komunitas minoritas dan marginal dalam relasinya dengan otoritas kelompok penguasa yang hegemonik.

Dengan kata lain, multikulturalisme merupakan gagasan dekonstruksi kebudayaan dalam wacana cultural studies yang merepresentasikan kelompok ras atau etnik yang berbeda-beda yang diimajinasikan dapat hidup dalam relasi kesetaraan dan keadilan. Terbentuknya perbedaan itu sendiri diyakini sebagai perwujudan dari proses perfeksi atau proses penyempurnaan diri. Perfeksi itu harus dilihat sebagai fakta yang terjelma dalam sebuah kebudayaan. Konsep multikulturalisme tidak dapat disepadankan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa maupun kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Dengan demikian, simpul-simpul diskursus multikulturalisme dapat dilacak pada berbagai permasalahan kontemporer yang menopang ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan kelompok minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, serta tingkat dan mutu produktivitas. Multikulturalisme bukan hanya sebatas gerakan wacana resisten tanpa aksi, namun juga sebuah ideologi pemberdayaan yang harus diperjuangkan secara bersama untuk

memberi landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan tata sosial yang berdasarkan keadilan. Mungkin tidak berlebihan bila disebutkan bahwa multikulturalisme merupakan kesadaran politik identitas yang menolak klaim universalisme dan monoisme kultur, ras, etnik, jender maupun genre peradaban tertentu.

Pendidikan Multikultural

Kellner (2003:167) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural dirancang untuk mendukung perkembangan keragaman murni dengan memodifikasi kurikulum bidang studi, baik melalui proses penyusutan, pengembangan, maupun pengayaan, yang kesemuanya itu untuk membantu peserta didik dalam memahami sejarah dan kebudayaan bangsa. Melalui strategi ini diharapkan dapat mendorong penciptaan masyarakat demokratik yang lebih beragam dan menyeluruh. Pendapat Kellner, selaras dengan pemikiran Abdul Munir Mulkan (2004:5) bahwa ide dasar pendidikan multikultural berawal dari asumsi bahwa manusia memiliki identitas, sejarah, lingkungan, dan pengalaman hidup unik yang berbeda-beda. Dikemukakan pula bahwa pengalaman hidup unik yang dialami setiap manusia beragama tidak ubahnya dalam doktrin tradisi sufi, *man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu*, artinya bahwa manusia perlu memahami dirinya sendiri. Akar pengenalan diri bermakna untuk mengenal Tuhan-nya, alam semesta, dan orang lain. Proses mengenal itu bernuansa pengakuan terhadap adanya perbedaan, dan nuansa ini merupakan unsur terpenting dalam membangun kesadaran diri dan kesadaran kolektif, serta membuka cakrawala dialog secara terbuka dan kritis.

Kegagalan bidang studi agama, Pancasila dan kewarganegaraan, serta kewiraan dalam mewujudkan pendidikan multikultural, memberi ruang gerak bidang studi sejarah, khususnya Sejarah Indonesia, untuk merevitalisasi dan mereaktualisasikan bidang studinya sendiri. Revitalisasi dan reaktualisasi dapat dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur pendidikan multikultural dalam bidang studi sejarah, sehingga

fakta dan peristiwanya tidak kering, menjadi hidup, dan diminati peserta didik. Mengapa bidang studi sejarah?, karena bidang studi sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah formal sarat dengan fakta dan peristiwa yang saling terkait, dan dapat digunakan untuk kepentingan apa saja, baik politis, ideologis, kajian kritis maupun diingat sebagai ingatan sosial (Gardiner, 1959). Menurut Paul Ricoeur yang dikutip Ruslani (2003:41) bahwa ingatan sosial memiliki dua jenis hubungan dengan masa lalu, yaitu relasi pengetahuan dan relasi tindakan. Apabila ingatan sosial digunakan sebagai sebuah pengetahuan, perlu kiranya, mempertanyakan apakah ingatan sosial dapat disalahgunakan? Dua kata digunakan dan disalahgunakan merupakan faktor penting bila ingatan sosial dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah formal. Banyak peristiwa sejarah bernuansa politis diajarkan di sekolah tanpa menghiraukan ‘akan menjadi’ ingatan sosial yang disalahgunakan.

Sejarah dan pendidikan multikultural adalah dua sisi mata uang yang selalu berkaitan. Pendidikan multikultural belum menjadi bahan pertimbangan dan kajian dalam pembelajaran sejarah, karena aspek ini mengutamakan domain afektif dan fragmentasi pembelajarannya telah dilakukan pendidikan kewiraan, kewarganegaraan, dan pendidikan agama. Menurut Collingwood (1965) bahwa unsur ‘sisi dalam’ yang ada dalam pembelajaran sejarah dapat dimanfaatkan untuk pendidikan multikultural. Yang dimaksud dengan ‘sisi dalam’ adalah berbagai pemikiran-pemikiran yang menyelimuti sebuah peristiwa sejarah.

Pendidikan multikultural adalah *set of believe* yang mengakui dan menilai pentingnya kearifan lokal dan keragaman yang dimiliki komunitas etnis untuk membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kelompok sosial maupun negara (Hamim Ilyas, 2005). Pendidikan multikultural sangat diperlukan sebuah negara demokrasi baru seperti Indonesia, untuk melakukan rekonstruksi sosial dengan mengembangkan civic skill, yaitu keterampilan menjadi warga masyarakat yang demokratis. Ciri dari keterampilan ini di antaranya adalah toleran dan mampu mengakomodasikan berbagai jenis perbedaan

untuk kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif pembelajaran, 'sintesis multikultural' memiliki rasional yang paling mendasar yang diidentifikasi ke dalam tiga tujuan attitudinal, kognitive, dan instructional (Nasikun, 2005), yaitu:

- (1) Pada tataran attitudinal, pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemaikan dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, pengembangan sikap budaya yang responsif, serta keahlian untuk melakukan penolakan konflik dan resolusi konflik.
- (2) Pada tataran kognitive, pendidikan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengembangan pengetahuan tentang kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan kemampuan untuk membangun kesadaran kritis tentang kebudayaannya sendiri.
- (3) Pada tataran instruksional, pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan melakukan koreksi atas distorsi, stereotype, peniadaan, dan misinformasi tentang kelompok etnik dan kultural yang dimuat dalam berbagai buku dan media pembelajaran; menyediakan strategi untuk melakukan hidup di dalam pergaulan multikultural, menyediakan perangkat konseptual untuk melakukan komunikasi multikultural, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, menyediakan teknik evaluasi, dan membantu menyediakan klarifikasi serta penjelasan tentang dinamika perkembangan kebudayaan.

Menurut Abdul Munir Mulkan (2004) bahwa gagasan pendidikan multikultural bersumber dari prinsip martabat keunikan setiap peserta didik. Pendidikan formal diletakkan dalam ide deschooling Ivan Illich, dan mengandaikan sekolah dan kelas dikelola sebagai simulasi untuk memerankan realitas plural. Pemerannya adalah siswa, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Model pembelajaran yang dikembangkan

adalah dialog dan pengayaan pengalaman peserta didik tentang identitas, sejarah, dan pengalaman, sehingga dapat tumbuh kesadaran kolektif yang kelak menjadi dasar etika politik serta etika kewargaan.

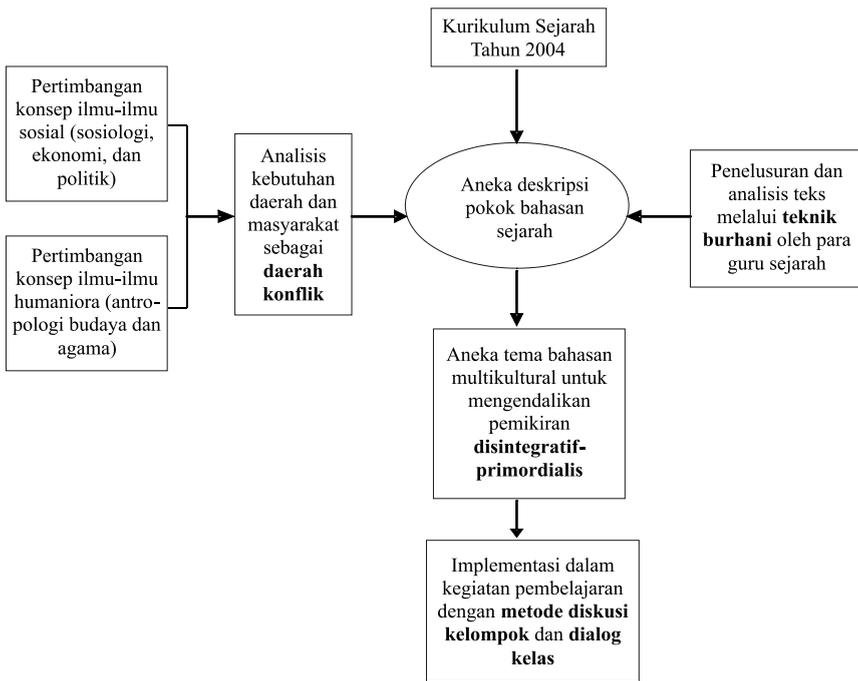
Model Pembelajaran

Klaim ideologis dan politis terhadap peristiwa sejarah membawa dampak dislokasi sosial masyarakat. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 adalah bukan peristiwa tunggal, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi kemunculannya, dan penggunaan sebagai bahan ajar harus ditempatkan pada konteks etika pengetahuan serta bangunan rekonsiliasi. Begitu pula dalam peristiwa pembuangan Paku Buwana VI (PB VI) adalah peristiwa lokal, dan penggunaan sebagai bahan ajar harus dapat menggambarkan dampak sosial yang ditimbulkannya bagi keluarga PB VI dan para pendukungnya. Kenyataan sosial menunjukkan bahwa mereka terpinggirkan dari komunitas keraton dan hidup sangat menderita. Lingkungan sosial tidak kondusif lagi bagi anak-anak keluarga PB VI, bahkan Pangeran Prabuwijaya (calon PB IX) memilih pergi dari istana menyendiri di Langenharjo, terletak di pinggir Sungai Bengawan Solo (Florida, 2003:85).

Kedua peristiwa di atas dapat direvitalisasi dan direaktualisasikan menjadi bidang studi sejarah yang bernuansa multikultural. Deskripsi tema bahasan dalam kurikulum sejarah dapat dimodifikasi dan ditransformasikan ke dalam tema multikultural yang berpraxis pembelajaran konstruktivisme (Samsu Rizal Panggabean, 2005). Modifikasi dan transformasi tidak berarti menghilangkan aspek pengetahuan kesejarahan, tetapi menengahkan pedagogis yang dialektikal terhadap kearifan lokal dan keragaman dalam masyarakat Indonesia, sehingga peserta didik memiliki kesadaran kritis emansipatoris (Moeslim Abdurrahman, 2004:4). Karena itu, fenomena-fenomena tentang keadilan, demokrasi, prinsip etika dan moral, penegakkan hukum, dan HAM perlu diselipkan dalam pembelajaran sejarah, serta disesuaikan dengan keperluan daerah dan tidak meninggalkan unit nasionalnya. Unsur daerah dan nasional

dalam pengamatan menjadi titik pijak dalam tema bahasan multikultural, karena di masa depan unsur-unsur ini berperan dalam refleksi terhadap persoalan-persoalan sosial yang muncul pada tingkat daerah dan nasional, menjadikannya sebagai proses latihan berpikir, dan merekonstruksi pemikiran peserta didik untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Model pengayaan semacam ini dapat menumbuhkan *insight* terhadap pembelajaran sejarah yang bernuansa multikultural, sehingga konsep dan nilai dari sebuah realitas sosial dapat terkomunikasikan dengan baik (Auseble, Novak & Hasenian, 1978).

Rancangan pembelajaran sejarah yang bernuansa multikultural dapat dilakukan melalui teknik dan strategi tertentu. Yang dimaksud dengan teknik tertentu adalah teknik burhani. Teknik burhani adalah teknik analisis teks yang sering digunakan dalam ilmu agama untuk menghubungkan teks-teks agama ke dalam realitas kehidupan sosial secara kritis, kontekstual, komunikatif, dan dialogis dengan berpedoman pada perspektif ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora (Amin Abdullah, 2003: xxi-xxiii). Teknik burhani dapat berperan untuk menelusuri dan menganalisis aneka teks sejarah, atau aneka pernyataan dari seorang pelaku sejarah, atau peristiwa-peristiwa dari pengalaman kolektif masa lalu. Hasil penelusuran dan analisis selanjutnya dimodifikasi dan ditransformasikan ke dalam tema bahasan bernuansa multikultural. Dalam modifikasi dan transformasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat setempat. Rancangan model pembelajaran sejarah bernuansa multikultural dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Berpijak pada bagan di atas, daerah konflik, seperti halnya Kota Surakarta, Aceh, Ambon, Poso, dan lain-lain sangat membutuhkan tema bahasan yang menonjolkan kearifan lokal dan keragaman dalam interaksi sosial. Keberhasilan dalam penyusunan tema bahasan bernuansa multikultural adalah tidak terlalu menekankan pada aspek etnosentrisme, tetapi juga mempertimbangkan aspek kelokalan yang sarat dengan nilai-nilai kerukunan, gotong royong, dan lain sebagainya. Kasus Kota Solo sebagai kota konflik dalam catatan sejarah telah terjadi 15 kali kerusuhan. Selama pemerintahan orde baru telah terjadi 8 kali kerusuhan, dan kerusuhan itu dalam bentuk pembunuhan dan pembakaran bangunan kota dengan eskalasi bersifat siklus antara 10-15 tahun sekali (Soedarmono, 2004). Ciri kerusuhan semacam ini merupakan penyakit sosial masyarakat yang senantiasa muncul di antara

dua sifat, yaitu endemik dan patologis. Sementara itu, tema nasional dapat direduksi menjadi tema daerah, misalnya tema bahasan tentang pembuangan Sutan Sjahrir ke Banda Neira pada tahun 1936. Pada masa pembuangannya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan penggalangan persatuan dan mengobarkan semangat nasionalisme dengan menjunjung tinggi harmoni dan toleransi di antara masyarakat setempat, tanpa membedakan suku, ras, etnis, dan agama.

Penelurusan dan analisis teks atas fakta dan peristiwa sejarah melalui teknik burhani dalam bagan di atas dapat berperan:

- (1) memberi keterampilan kepada para guru dan peserta didik dalam analisis teks sejarah.
- (2) memberi keterampilan dalam menghasilkan tema-tema bernuansa multikultural yang bermanfaat dalam pengembangan kurikulum nasional dengan memasukkan unsur-unsur kearifan lokal dan keragaman, serta berpijak pada paradigma ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora;
- (3) menjadikan kurikulum nasional sebagai penumbuh dan pelembaga tema-tema multikultural (Samsu Rizal Panggabean, 2005)

Apabila keterampilan di atas dikuasai guru dan peserta didik, di masa mendatang membangun kesadaran kritis emansipatoris terhadap kearifan lokal dan keragaman yang dimiliki bangsa, sehingga interaksi sosial mereka tidak tersekat-sekat dalam perbedaan pemikiran suku, agama, ras, dan aliran. Dengan demikian kearifan lokal dan keragaman bermanfaat dalam merekonstruksi pengembangan civic skill masyarakat pluralis (Hamim Ilyas, 2005), sehingga peserta didik menjadi *to make a living, to lead a meaningful life, dan to ennoble life* (Mochtar Buchori, 2005:50).

Penutup

Pendidikan multikultural adalah proses penanaman hidup untuk menghormati secara tulus dan toleran terhadap kearifan lokal dan

keragaman budaya di tengah-tengah pluralisme masyarakat. Melalui pendidikan multikultural diharapkan terjadi kelenturan mental budaya bangsa dalam menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tidak mudah dipatahkan.

Tema bahasan pendidikan multikultural dapat dihasilkan melalui modifikasi dan transformasi kurikulum sejarah nasional dengan teknik burhani. Teknik burhani adalah teknik analisis teks yang sering digunakan dalam ilmu agama untuk menghubungkan teks-teks agama ke dalam realitas kehidupan sosial. Penelusuran terhadap deskripsi pokok bahasan dalam kurikulum sejarah dilakukan untuk memperoleh tema-tema bahasan yang memungkinkan dikembangkan menjadi tema multikultural. Setelah ditemukan tema itu kemudian dilakukan proses penyusutan, pengembangan, dan pengayaan melalui teknik burhani.

Penerapan teknik ini dalam pengajaran sejarah di sekolah-sekolah formal, pada satu sisi meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan kurikulum nasional bidang studi sejarah, pada sisi lain kurikulum nasional bidang studi sejarah sebagai penumbuh dan pelembaga tema-tema bahasan bernuansa pendidikan multikultural.

Daftar Pustaka

- Abdul Munir Mulkan. 2004. "Pendidikan Mono-Kultur Versus Multikultural dalam Politik", dalam *Kompas*, Selasa, 28 November.
- Amin Abdullah. 2003. "Kata Pengantar" dalam Zakiyudin Baidhawiy & Mutohharun Jinan (ed.). *Agama dan Pluralisme Budaya Lokal*. Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, Univ. Muhammadiyah.
- Ausubel, D.P., Novak, J.D. & Hasenian, H. 1988. *Educational psychology, a cognitive view*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Budhy Munawar Rachman. 2004. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Srigunting.

- Castle, Lance. 1998. "Nasionalisme Kontemporer dan Relevansinya bagi Indonesia", dalam Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi (eds.), *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press.
- Collingwood, R.G. 1965. *The Idea of History*. New York: A Galaxy Books.
- Edi Sudrajat. 1998. "Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional: Satu Tinjauan dari Segi Strategi Hankam", dalam Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi (eds.), *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press.
- Fajar Riza Ul Haq. 2004. "Beban Visional Masyarakat Multikultural", dalam *Kalimatun Sawa*, Volume 02, Nomor 01.
- Florida, Nancy K. 2003. "Writing the Past, Inscribing the Future: History as Prophecy in Colonial Java", a.b. Revianto B. Santoso dan Nancy K. Florida, *Menyurat Yang Silam Menggurat Yang Menjelang*. Yogyakarta: Bentang.
- Gardiner, Patrick. 1959. *Theories of History*. New York: The Free Press.
- Geertz, Clifford. 1975. *The Interpretation of Culture, Selected Essays*. London: Hutchinson.
- Hamim Ilyas. 2005. "Pendidikan Multikultural dalam Wacana Tafsir Al Qur'an", *Makalah Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman*. Diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah. Surakarta, 8 Januari.
- Hari Juliawan, B. 2004. "Kerangka Multikulturalisme", dalam *Kompas*, Senin, 28 September.
- Huntington, Samuel P. 2001. "The clash of Civilization and the Remarking of the World Order", a.b. M. Sadat Ismail, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta:

Qalam.

- Kellner, Douglas. 2003. *Teori Radikal*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Mochtar Buchori. 2005. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moerdiono. 1998. "Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional", dalam Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi (eds.), *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press.
- Moeslim Abdurrahman. 2004. "Kelas Menengah Islam dan Multikulturalisme", dalam *Kompas*, Senin, 1 November.
- Mohamad Sobary. 2004. "The Creation and the Interpretation of Religious Symbols: The Role of Media in Achieving Religious Harmony", Paper presented at the International Conference on Religious Harmony: Problems, Practice, and Education, Yogyakarta and Semarang on September 27th – October 3th.
- Musa Asy'arie. 2004. "Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa", dalam *Kompas*, Jum'at, 3 September.
- Nasikun. 2005. "Imperatif Pendidikan Multikultural di Masyarakat Majemuk", *Makalah Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman*. Diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah. Surakarta, 8 Januari.
- Rabushka, Alvin & Kenneth A. Shepsle. 1972. *Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Stability*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Ruslani. 2005. "Ingatan Sosial dan Etika Politik", dalam *Kompas*, Rabu, 1 Juni.
- Samsu Rizal Panggabean. 2005. "Multikultural dan Kekerasan Kolektif di Indonesia", *Makalah Seminar Pendidikan Multikultural* seba-

gai Seni Mengelola Keragaman. Diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah. Surakarta, 8 Januari.

Soedarmono. 2004. *Sejarah dan Morfologi Kota Konflik Solo: dari periode kolonial-orde baru*. Laporan Hasil Penelitian. Surakarta: Solo Heritage Society.

Zakiyudin Baidhawy. 2004. “Tantangan Humanitas baru dalam Pendidikan Multikultural”, dalam *Kalimatun Sawa*, Volume 02, Nomor 01, 2004.